

ABSTRAK

Desa wisata merupakan salah satu kegiatan kepariwisataan yang memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan wisata desa merupakan kewenangan pemerintah desa, namun hal tersebut tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, padahal jika berdasar pada teori kewenangan, pemerintah desa berwenang dalam mengelola wisata desa. Permasalahan penelitian ini meliputi berbagai dinamika aturan terkait kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan terhadap kekosongan hukum untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan kekosongan hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait kewenangan pemerintah desa terhadap pengelolaan wisata desa. Kedua, untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan pengelolaan wisata desa melalui peraturan desa.

Kata Kunci : Kewenangan, Pariwisata, Desa, Pemerintah

ABSTRACT

Village tourism is one of the tourism activities that make a large and significant contribution to the economy in Indonesia. In Indonesia, the management of village tourism is the authority of the village government, but this is not clearly regulated in Indonesian laws and regulations, if based on the theory of authority, the village government manages village tourism. The problems of this research include various dynamics of regulations related to the authority of the village government in managing village tourism. This type of research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach, where this research was conducted with the aim of providing legal arguments as the basis for the importance of regulating the law to provide legal certainty and authority to the village government in managing village tourism. This research results first, based on existing legal policies, it is very important to make regulations related to village government in managing village tourism. Second, to fill financial needs in managing village tourism through villages.

Keywords: Authority, Tourism, Village, Government

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Keaslian PenelitianTabel Keaslian Penelitian.....	11
1.5.6 Analisis Bahan Hukum	12

1.6	Sistematika Penulisan	13
BAB II	14	
BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT WISATA DESA	14	
2.1	Pengertian Kewenangan Pemerintahan Desa	14
2.2	Pengertian Pengelolaan Wisata Desa	18
2.3	Pengertian Peraturan Desa	19
2.4	Teori Pemerintahan	21
2.5	Teori Kewenangan	25
2.6.	Teori Peraturan Perundang-Undangan	28
BAB III.....	32	
KEWENANGAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA	32	
3.1	Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata	32
3.2	Pengelolaan Wisata Desa Melalui Peraturan Desa	41
BAB IV	51	
PENUTUP.....	51	
4.1.	Kesimpulan	51
4.2.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53	